



MEMAHAMI LIBERALISASI PERDAGANGAN: DAMPAK DAN IMPLIKASINYA DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL

Wafik Azizah

azizahwafik57@gmail.com

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Binar Nan Baik

binarnanbaik@gmail.com

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Muhammad Reza Fahlefi

muhamadlefireza234@gmail.com

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sarpini

sarpini@uinsaizu.ac.id

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi penulis: *azizahwafik57@gmail.com*

Abstract. *Trade liberalization is the process of reducing trade barriers between countries, such as tariffs and quotas, with the aim of increasing the flow of goods and services globally. This paper examines the impact and implications of trade liberalization in the global economy, both in terms of advantages and disadvantages. On the one hand, liberalization can improve industrial efficiency, expand market access, and encourage economic growth, especially in developing countries. However, on the other hand, trade liberalization can also cause losses for certain sectors, such as local industries that cannot compete with cheaper imported products. This study uses a descriptive qualitative research method, presenting data naturally and in accordance with field conditions. Through this approach, data is processed and analyzed to describe the reality of the phenomenon being studied. In addition, this study is also strengthened by a theoretical basis and literature review to support the research. The main findings show that the impact of trade liberalization is highly dependent on the readiness of policies and economic structures of each country. Developing countries need to adopt policies to protect vulnerable sectors, such as subsidies or workforce training, to maximize the benefits of liberalization. In addition, the role of international trade organizations such as the WTO is also important in overseeing and regulating global trade, despite facing challenges in ensuring compliance and equality between member countries.*

Keywords: *Trade Liberalization, Impact, Implications*

Abstrak. Liberalisasi perdagangan merupakan proses pengurangan hambatan perdagangan antar negara, seperti tarif dan kuota yang bertujuan untuk meningkatkan aliran barang dan jasa secara global. Makalah ini mengkaji dampak dan implikasi liberalisasi perdagangan dalam ekonomi global, baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Di satu sisi, liberalisasi dapat meningkatkan efisiensi industri, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Namun, di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga dapat menyebabkan kerugian bagi sektor-sektor tertentu, seperti industri lokal yang tidak dapat

bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menyajikan data secara alami dan sesuai dengan kondisi lapangan. Melalui pendekatan ini, data diolah serta dianalisis untuk menggambarkan realitas terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan landasan teori dan kajian pustaka guna mendukung penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa dampak liberalisasi perdagangan sangat bergantung pada kesiapan kebijakan dan struktur ekonomi masing-masing negara. Negara berkembang, perlu mengadopsi kebijakan untuk melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti subsidi atau pelatihan tenaga kerja, untuk memaksimalkan manfaat dari liberalisasi. Selain itu, peran organisasi perdagangan internasional seperti WTO juga penting dalam mengawasi dan mengatur perdagangan global, meskipun menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan dan kesetaraan antar negara anggota.

Kata Kunci: *Liberalisasi Perdagangan, Dampak, Implikasi*

A. Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan adalah proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, dan regulasi non-tarif lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan kompetitif (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung dkk., 2021). Sebagai salah satu elemen utama globalisasi, liberalisasi perdagangan telah menjadi pendorong perubahan struktural dalam ekonomi dunia, mempengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai negara. Konsep ini didasarkan pada prinsip perdagangan bebas yang menekankan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya, spesialisasi produksi, dan pertukaran yang saling menguntungkan antarnegara. Dalam teori ekonomi, liberalisasi perdagangan sering dikaitkan dengan keuntungan komparatif, yang memungkinkan setiap negara untuk fokus pada produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan relatif.

Sejak abad ke-20, liberalisasi perdagangan telah berkembang pesat melalui berbagai perjanjian internasional, seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang kemudian berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization). Selain itu, integrasi ekonomi regional seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area), NAFTA (North America Free Trade Agreement), EU (Europe Union), MERCOSUR (the Southern Part of South America), CARICOM (Central America) juga mencerminkan upaya negara-negara untuk memperkuat kerja sama perdagangan di tingkat kawasan (Musjtari, 2014). Dengan adanya liberalisasi perdagangan, negara-negara di seluruh dunia dapat memanfaatkan pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mendorong aliran investasi asing langsung. Namun, dampak dari liberalisasi perdagangan tidak selalu positif dan merata di semua negara atau sektor ekonomi.

Di satu sisi, liberalisasi perdagangan telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan akses pasar, pengurangan biaya produksi, dan penyebaran teknologi. Negara-negara berkembang, dapat memanfaatkan peluang untuk mengeksport produk-produk unggulannya ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, konsumen di berbagai negara juga mendapat keuntungan dari harga barang yang lebih

murah dan variasi produk yang lebih banyak (Budiyanti, 2017). Namun, di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga membawa tantangan yang kompleks. Tekanan terhadap industri domestik, ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali menjadi konsekuensi dari kebijakan perdagangan bebas yang tidak terkelola dengan baik.

Dalam konteks global, liberalisasi perdagangan juga memunculkan isu-isu baru yang memerlukan perhatian serius, seperti dampak terhadap keberlanjutan lingkungan, hak-hak pekerja, dan stabilitas sosial. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterbukaan pasar dan melindungi industri lokal yang rentan terhadap persaingan internasional. Selain itu, liberalisasi perdagangan dapat memperbesar kesenjangan antara negara maju dan berkembang, terutama jika keuntungan perdagangan tidak didistribusikan secara adil (Manuputy, 2019).

B. Kajian Pustaka

Dalam konteks ekonomi global, penelitian terdahulu menyoroti bahwa keberhasilan liberalisasi perdagangan sangat bergantung pada kesiapan kebijakan domestik dan struktur ekonomi masing-masing negara (Manuputy, 2019). Untuk memaksimalkan manfaat liberalisasi, negara berkembang disarankan mengadopsi kebijakan seperti subsidi bagi sektor rentan dan pelatihan tenaga kerja guna meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Selain itu, Fauzi (2023) juga menyoroti peran penting WTO sebagai badan pengawas perdagangan internasional dalam memastikan kepatuhan dan kesetaraan antar negara anggota, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekonomi nasional juga menjadi perhatian utama. Seran (2014) menjelaskan bahwa keterbukaan pasar mampu mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing industri nasional. Di sisi lain, tekanan kompetisi internasional dapat memaksa perusahaan domestik yang kurang efisien untuk keluar dari pasar. Dampak ini menjadi perhatian dalam banyak studi, yang menekankan pentingnya penguatan kebijakan proteksi terhadap sektor-sektor yang paling rentan.

Implikasi jangka pendek dan jangka panjang dari liberalisasi perdagangan turut dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola dinamika pasar. Penurunan tarif impor, misalnya, dapat meningkatkan volume perdagangan tetapi juga membawa risiko bagi sektor domestik. Di sisi lain, dalam jangka panjang, liberalisasi perdagangan mendorong pertumbuhan industri padat karya melalui peningkatan investasi dan permintaan tenaga kerja (Purwiyanta, 2006).

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan merupakan fenomena yang kompleks, menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian global. Pemahaman mendalam mengenai dinamika perdagangan internasional dan kebijakan domestik yang adaptif menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dari liberalisasi perdagangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dibahas dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan rinci mengenai fenomena yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, analisis data sering kali mengacu pada model Miles dan Huberman. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengelola data secara terstruktur dan sistematis, sehingga tidak hanya terbatas pada pengumpulan informasi, tetapi juga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna terhadap permasalahan yang diteliti (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Tujuan utamanya adalah memahami fenomena atau masalah secara mendalam dengan memberikan deskripsi yang komprehensif tentang konteks, subjek, dan situasi yang sedang dianalisis. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengevaluasi literatur yang relevan, termasuk konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya.

Kajian pustaka berperan penting dalam meninjau literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang relevan serta temuan-temuan yang mendukung (Hadi & Afandi, 2021). Selain itu, metode ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data semata, tetapi juga pada proses penafsiran dan pemahaman data secara mendalam. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan menyeluruh terkait fenomena yang dikaji tanpa melibatkan subjek penelitian secara langsung.

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini sangat cocok digunakan untuk eksplorasi teoritis atau analisis data yang telah tersedia, terutama pada penelitian yang tidak memerlukan eksperimen atau survei terhadap partisipan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek fenomena secara kritis dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan adalah proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan antar negara, seperti tarif, kuota, subsidi, dan regulasi non-tarif lainnya, dengan tujuan menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan kompetitif. Liberalisasi perdagangan merujuk pada sebuah konsep ekonomi yang menekankan perdagangan barang dan jasa antarnegara yang berlangsung secara terbuka dan bebas, dengan cara mengurangi atau bahkan menghapus berbagai hambatan dan pembatasan yang ada. Tujuan utama dari liberalisasi ini adalah menciptakan kondisi perdagangan global yang tidak terbatas, tanpa perlindungan yang berlebihan, serta meminimalkan hambatan yang dapat menghalangi aktivitas ekonomi lintas negara. Sebagai hasilnya, tingkat persaingan di antara para pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional, menjadi semakin tinggi.

Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang diatur oleh kebijakan masing-masing negara, baik maju maupun berkembang. Faktor politik memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan ini, seperti

perlindungan industri lokal, peningkatan ekspor, serta pemberian preferensi khusus kepada negara berkembang (Roza Nova, 2024). Di sisi lain, negara maju menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi domestik dan tekanan internasional. Pemahaman mendalam tentang pengaruh politik terhadap kebijakan perdagangan internasional sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan menguntungkan

Dalam konteks globalisasi, ideologi-ideologi seperti kapitalisme, individualisme, dan liberalisme menjadi semakin lazim dalam dunia perdagangan internasional. Pemahaman ini perlahan-lahan terintegrasi ke dalam sistem perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun sering kali tidak disadari. Kebijakan yang mendukung perdagangan bebas ini juga telah memengaruhi struktur ekonomi nasional, mengarahkan banyak pihak untuk lebih mengandalkan mekanisme pasar sebagai penggerak utama roda perekonomian (Astiyah dkk., 2005).

Beberapa pengamat ekonomi di Indonesia mengungkapkan bahwa sistem ekonomi nasional telah mengalami pergeseran dari prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan kerja sama kolektif, ke arah sistem ekonomi yang lebih bercorak kapitalis dan liberal. Hal ini terlihat dari penerapan kebijakan seperti privatisasi, deregulasi, dan pengurangan subsidi, yang dianggap mencerminkan nilai-nilai ekonomi pasar bebas. Pergeseran ini dinilai mengurangi peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Akibatnya, muncul berbagai tantangan dalam mengelola dampak dari liberalisasi perdagangan. Di satu sisi, keterbukaan pasar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional, tetapi di sisi lain, jika tidak diiringi dengan kebijakan perlindungan yang memadai, hal ini dapat melemahkan industri lokal, memperburuk ketimpangan ekonomi, dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, memahami secara mendalam tentang dinamika dan dampak liberalisasi perdagangan menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Bacchetta & Jansen, 2003).

Liberalisasi perdagangan memberikan peluang bagi produsen domestik untuk memperluas akses ke pasar internasional, namun juga membawa tantangan berupa meningkatnya tekanan kompetisi di berbagai sektor industri. Kebijakan ini tidak hanya mendorong peningkatan efisiensi dalam proses produksi melalui alokasi sumber daya yang lebih optimal, tetapi juga menciptakan lingkungan industri yang lebih kompetitif. Dalam situasi ini, persaingan yang ketat antara perusahaan lokal dan asing akan memaksa perusahaan domestik yang kurang efisien untuk keluar dari pasar, sehingga pada akhirnya meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam industri tersebut.

Dengan hadirnya kompetisi yang lebih tinggi, perusahaan domestik terdorong untuk memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang ada secara maksimal, menghasilkan tingkat output yang optimal. Proses ini membantu mereka mencapai efisiensi teknis yang maksimal, di mana setiap input digunakan secara efektif untuk menghasilkan output terbaik. Dampak positif dari peningkatan daya saing ini tidak

hanya dirasakan oleh industri secara keseluruhan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan (Seran, 2014).

Sejarah Liberalisasi Perdagangan

Krisis politik sering kali membuka peluang bagi negara-negara untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada berbagai peristiwa sejarah seperti di Chile pada tahun 1973-1974, Meksiko pada tahun 1986, Brazil dan Argentina di awal 1990-an, Afrika Selatan pada pertengahan 1990-an, Rusia di akhir 1980-an, serta Sri Lanka pada tahun 1977. Selain itu, Australia dan Selandia Baru juga mengalami proses serupa pada periode 1983-1984. Liberalisasi perdagangan menjadi salah satu langkah kunci yang diambil oleh negara-negara tersebut untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Secara historis, gagasan liberalisasi perdagangan berakar pada pemikiran Adam Smith, yang dalam teorinya mendukung perdagangan bebas serta peran pemerintah yang seminimal mungkin dalam perekonomian. Ide ini semakin berkembang pada abad ke-19 di Eropa, di mana penerapan perdagangan bebas memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran kawasan tersebut. Namun, momentum liberalisasi perdagangan mulai terhenti pada tahun 1914 akibat berbagai distorsi yang muncul, seperti kebijakan larangan impor, pemberian subsidi, dan peningkatan tarif yang menghambat perdagangan antarnegara.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi sistem perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. Pada dekade 1930-an, berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip perdagangan bebas. Upaya ini akhirnya berujung pada pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), sebuah kerangka kerja internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan aturan yang lebih transparan. GATT kemudian berkembang menjadi World Trade Organization (WTO), sebuah lembaga global yang secara resmi didirikan untuk mengawasi dan memfasilitasi perdagangan internasional (Islamiani, 2022). Inisiatif ini terutama didorong oleh Amerika Serikat dan Inggris, yang berperan sebagai penggagas utama dalam membangun kembali sistem perdagangan global pasca-Perang Dunia II.

Dengan terbentuknya WTO, liberalisasi perdagangan mendapatkan landasan institusional yang lebih kuat, memungkinkan negara-negara di seluruh dunia untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Meski demikian, perjalanan liberalisasi perdagangan tidak sepenuhnya mulus. Berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi antarnegara, dampak sosial, dan isu keberlanjutan, tetap menjadi perhatian utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, memahami sejarah dan dinamika liberalisasi perdagangan menjadi penting untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan (Kholiq dkk., 2024).

Keuntungan Liberalisasi Perdagangan

Secara umum, liberalisasi perdagangan memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang, termasuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dengan meningkatkan ekspor produk-produk padat karya, terutama di sektor manufaktur. Namun, tingkat manfaat yang dirasakan sangat bergantung pada langkah-langkah reformasi kebijakan yang diambil dan kondisi struktur ekonomi domestik masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, liberalisasi perdagangan melalui Putaran Uruguay (PU) membuka potensi perluasan akses pasar, khususnya ke negara-negara industri maju.

Penurunan tarif di berbagai pasar ekspor utama menjadi salah satu dampak positif yang signifikan. Beberapa produk unggulan ekspor Indonesia akan menikmati pemotongan tarif besar, seperti komoditas kayu, pulp, kertas, dan furnitur dengan pengurangan hingga 69 persen; produk mineral dan logam utama sebesar 59 persen; biji berminyak dan lemak sebesar 40 persen; serta kopi, teh, kakao, dan gula sebesar 34 persen. Akibatnya, kontribusi dari ekspor berbagai komoditas tersebut terhadap total nilai ekspor meningkat signifikan, yaitu dari 21 persen menjadi 50 persen. Selain itu, produk pertanian juga mendapat manfaat dari pengurangan tarif yang substansial. Buah-buahan dan sayuran mengalami penurunan tarif sebesar 36 persen, bumbu-bumbu sebesar 35 persen, biji-bijian sebesar 39 persen, dan produk pertanian lainnya sebesar 48 persen. Penurunan tarif ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan volume ekspor tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Dengan strategi yang tepat, liberalisasi perdagangan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia (Hardono dkk., 2016).

Kelemahan Liberalisasi Perdagangan

a. Aspek Diplomasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi yang semakin meluas menjadikan diplomasi ekonomi sebagai salah satu elemen kunci dalam politik luar negeri. Dalam kerangka ini, hubungan ekonomi antarnegara tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas perdagangan atau investasi semata, tetapi juga sebagai elemen strategis yang mempererat hubungan politik. Hubungan ekonomi dapat bertindak sebagai penggerak yang memengaruhi dinamika hubungan politik antarnegara (*the influencer of political relations*). Dengan demikian, diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi antara kepentingan ekonomi dan politik, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas serta kemakmuran bersama.

b. Aspek Budaya Hukum Pelaku Industri

Dalam perspektif budaya hukum, permasalahan industri tidak hanya dapat diselesaikan melalui peran pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Pelaku industri nasional juga harus memegang peran aktif sebagai motor penggerak utama pembangunan industri nasional. Keberhasilan industri nasional tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan atau intervensi pemerintah, melainkan

memerlukan inisiatif mandiri dari para pelaku industri untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi produksi, pelaku industri juga harus turut berperan dalam pengawasan serta pengembangan praktik industri yang aman dan etis. Dengan mengambil tanggung jawab yang lebih besar, pelaku industri dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekosistem industri yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

c. Lemahnya Solidaritas dan Posisi Tawar Negara-negara Berkembang

Solidaritas di antara negara-negara berkembang masih menjadi tantangan besar dalam upaya menghadapi dominasi negara maju. Ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk bersatu seringkali diperburuk oleh strategi negara maju yang cenderung memecah belah kelompok negara-negara berkembang melalui berbagai inisiatif atau kebijakan yang tampak menguntungkan secara individu, namun merugikan secara kolektif. Hal ini melemahkan posisi tawar negara-negara berkembang dalam negosiasi internasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kesadaran kolektif, kerjasama yang erat, dan strategi diplomasi yang terkoordinasi untuk memperkuat solidaritas dan memaksimalkan potensi bersama. Dengan begitu, negara-negara berkembang dapat lebih mandiri dan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global (Fahrazi, t.t.).

Dampak Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan mempunyai dampak berbeda pada setiap tahun yang diamati. Pada tahun 1987, ketika liberalisasi perdagangan dimulai, liberalisasi perdagangan tidak memberikan dampak yang signifikan. Menurut Indrawati (1995), liberalisasi secara umum bermanfaat bagi negara berkembang dan masyarakat miskin yang berpendapatan menengah karena dapat meningkatkan ekspor produk padat karya (khususnya produk industri). Namun demikian besarnya manfaat dan keuntungan liberalisasi perdagangan sangat bergantung pada reformasi kebijakan yang dilakukan dan keadaan struktur ekonomi dalam negara berkembang (Nurrahma & Nurrahma, 2013).

Abimanyu (1995) yang mempelajari hubungan antara liberalisasi dan isu lingkungan hidup menemukan bahwa dalam liberalisasi perdagangan, negara manapun dapat menerapkan kebijakan mengenai subsidi, pajak dan peraturan pemerintah lainnya tanpa membedakan antara negara dalam dan luar negeri perusahaan. Hal serupa juga berlaku pada ketentuan peraturan GATT. Menurut Abimanyu, kemungkinan tersebut dapat berdampak positif pada kewajaran persaingan dan kemampuan perusahaan asing beradaptasi dengan kondisi (khususnya teknologi) di negara di mana perusahaan berlokasi. Namun peluang tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Artinya, teknologi dan produk “kotor” diimpor ke mitra dagang, terutama negara-negara berkembang dengan standar lingkungan yang lebih rendah (Susila, t.t.).

Studi Erwidodo dan Hadi (1999) tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap produksi, Pada tingkat makro, dalam kondisi sebelum krisis, konsumsi,

perdagangan dan pemasaran beberapa produk tertentu (beras, kedelai, jagung, singkong, kentang) di Indonesia dikurangi secara signifikan oleh pemerintah pusat dengan menurunkan tarif barang substitusi impor bahwa liberalisasi perdagangan antar negara mengurangi tarif substitusi impor. harga di tingkat pedagang, ukuran, harga produsen, kuantitas yang ditawarkan, dan surplus produsen. Namun, liberalisasi perdagangan meningkatkan kuantitas yang diminta, kuantitas yang diimpor, dan surplus konsumen. Dampak keseluruhannya adalah peningkatan surplus bersih dan peningkatan kesejahteraan nasional, namun besarnya perubahan bergantung pada elastisitas transfer tarif terhadap harga di tingkat pedagang besar, elastisitas transfer tarif terhadap harga di tingkat pedagang besar, dan elastisitas transfer terhadap perubahan harga dari harga grosir ke harga produsen. Banyak hal bergantung pada elastisitas harga dan elastisitas harga di tingkat grosir. penawaran dan permintaan. Elastisitas transfer tarif yang lebih tinggi akan mempunyai dampak negatif yang besar terhadap surplus produsen, namun juga akan mempunyai dampak positif yang besar terhadap surplus konsumen, yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak Liberalisasi dalam Jangka Pendek & Jangka Panjang

a. Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, tenaga kerja dapat berpindah antar sektor, sedangkan modal tidak dapat bergerak bebas antar sektor. Ketika harga barang impor turun (akibat penurunan tarif), jumlah permintaan barang tersebut meningkat. Produsen dalam negeri akan meningkatkan output dengan meningkatkan koefisien produksi tenaga kerja. Namun karena modal tidak dapat bergerak bebas antar sektor, maka faktor produksi modal tidak meningkat dalam jangka pendek. Peningkatan jumlah pekerja tanpa tambahan modal faktor produksi berdampak pada penurunan produk marjinal tenaga kerja (Haouas et al., 2002). Dengan asumsi bahwa upah dibayarkan sebanding dengan nilai produk marjinal, penurunan produk marjinal tenaga kerja berarti penurunan tingkat upah. Dengan kata lain, dalam jangka pendek, tarif yang lebih rendah akan meningkatkan output dan lapangan kerja, namun akan menurunkan upah pekerja.

b. Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam Jangka Panjang

Dalam model negara terbuka kecil, dimana faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas antar sektor, berlaku ketentuan sebagai berikut: Harga barang, teknologi, dan tarif dunia menentukan harga dalam negeri. Harga keseimbangan tercapai, dan harga impor dan ekspor dunia menentukan pendapatan faktor-faktor produksi. Dalam jangka panjang, seperti prediksi Stolper, akan terjadi penurunan harga komoditas akibat liberalisasi perdagangan. Untuk ekspor yang relatif padat karya, penurunan tarif menyebabkan peningkatan permintaan barang manufaktur padat karya sehingga menyebabkan peningkatan produksi industri padat karya.

Peningkatan output memerlukan lebih banyak pekerja, sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja dan, akibatnya, upah. Dalam jangka panjang, faktor-faktor produksi modal dapat berpindah antar sektor dan jumlah modal dapat meningkat.

Peningkatan jumlah modal ini meningkatkan produk marjinal tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat upah (Purwiyanta, 2006).

Kebijakan dalam Liberalisasi Perdagangan

Pemerintah menyediakan beberapa layanan seperti pembiayaan kredit usaha berorientasi ekspor, penyediaan fasilitas pameran, kegiatan pengembangan desain, layanan bagi pemangku kepentingan perusahaan, informasi peluang pasar, saran dan bantuan teknis, periklanan dan pemasaran, pembiayaan ekspor, penjaminan dan asuransi, dll. Kebijakan tersebut sedang diterapkan. Namun, karena ukurannya lebih kecil, kapasitasnya lebih kecil, dan lebih rentan dibandingkan perusahaan besar, maka mereka memerlukan dukungan dan intervensi yang lebih besar, terutama dari pemerintah, untuk memahami kebutuhan pasar internasional dan menjadi pemain yang sukses di pasar internasional (Mastering the Transition, 2022). Liberalisasi perdagangan mempunyai berbagai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang efektif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.

a. Restrukturisasi kebijakan perdagangan

Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Hal ini mencakup peninjauan terhadap tarif dan non-tarif yang ada untuk memastikan bahwa pertumbuhan di sektor-sektor potensial tidak terhambat.

b. Perlindungan terhadap sektor rentan

Memperkenalkan mekanisme perlindungan bagi sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak negatif liberalisasi perdagangan. Hal ini dapat berupa dukungan keuangan, subsidi, atau tindakan anti-dumping untuk melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat.

c. Berinvestasi dalam Pendidikan dan Pelatihan

Penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Hal ini membantu pekerja beradaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lapangan kerja.

d. Memperkuat jaminan sosial

Memperkuat sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak perubahan ekonomi. Hal ini termasuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan industri yang tidak kompetitif.

e. Kebijakan Lingkungan

Memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan perdagangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap

lingkungan. Kebijakan ini mungkin mencakup peraturan ketat mengenai pengembangan sumber daya alam dan emisi CO2.

f. Promosi inovasi dan penelitian

Memperkuat promosi inovasi dan penelitian di sektor industri. Pemerintah dapat menciptakan insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi pada teknologi baru dan praktik terbaik agar dapat bersaing lebih baik di pasar global (Budiyanti, n.d.)

Faktor politik sangat memengaruhi pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara maju dan berkembang. Negara maju lebih fokus pada liberalisasi dan ekspansi pasar, sementara negara berkembang berusaha melindungi ekonomi domestik. Pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika ini penting untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan efektif (Permata Sari & Ibrahim, 2023).

Implikasi Liberalisasi Perdagangan

Implikasi liberalisasi perdagangan merujuk pada efek yang ditimbulkan oleh pembukaan pasar dan pengurangan hambatan perdagangan antar negara. Ini mencakup peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, pertumbuhan ekspor, dan peningkatan persaingan di pasar domestik. Namun, liberalisasi juga dapat menyebabkan peningkatan impor yang lebih cepat daripada ekspor, berpotensi merugikan industri lokal dan neraca perdagangan. Selain itu, dampak ini bervariasi antara negara maju dan berkembang, dengan negara berkembang sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam bersaing di pasar global (Tanaem & Arisanto, 2009).

Liberalisasi perdagangan memiliki implikasi yang kompleks dan beragam terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari liberalisasi perdagangan:

a. Peningkatan Efisiensi dan Persaingan

Liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Selain itu liberalisasi perdagangan juga dapat meningkatkan persaingan antar negara dan antar perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produk dan harga yang lebih kompetitif.

b. Dampak pada Ekspor dan Impor

Liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan ekspor dengan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengeksport produknya ke pasar global. Sebaliknya, liberalisasi juga dapat meningkatkan impor dengan memungkinkan masuknya produk impor yang lebih murah dan berkualitas, yang dapat mempengaruhi industri domestik.

c. Pengaruh pada Perekonomian Negara

Negara maju yang telah mengalami liberalisasi perdagangan biasanya melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja industri manufaktur. Sedangkan bagi negara berkembang yang mengalami liberalisasi perdagangan dapat menghadapi tantangan seperti penurunan produksi domestik dan peningkatan pengangguran, tetapi juga dapat menikmati manfaat seperti peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

d. Dampak pada Komoditas Pertanian

Liberalisasi perdagangan dapat memiliki dampak yang signifikan pada komoditas pertanian. Negara produsen pertanian yang efisien dapat menikmati manfaat yang lebih besar, tetapi negara net-importir mungkin menderita kerugian. Selain itu komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet dapat meningkatkan harga dan volume perdagangan, tetapi komoditas lain seperti gula mungkin mengalami penurunan produksi.

e. Kebijakan dan Persiapan

Negara yang akan mengalami liberalisasi perdagangan perlu mempersiapkan kebijakan yang mendukung daya saing, seperti penurunan tarif dan penghapusan subsidi ekspor. Persiapan yang matang, termasuk perbaikan mutu produk dan peningkatan akses pasar, sangat penting untuk menghadapi liberalisasi perdagangan.

Dalam keseluruhan, liberalisasi perdagangan dapat membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi, persaingan, dan ekspor, tetapi juga dapat menghadapi tantangan seperti penurunan produksi domestik dan peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, setiap negara harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi implikasi yang kompleks dari liberalisasi perdagangan (Latifah, t.t.).

Peran World Trade Organization (WTO) dalam Mengatur & Mengawasi Liberalisasi Perdagangan

WTO berperan penting dalam mengatur dan mengawasi liberalisasi perdagangan internasional. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang lebih terbuka dan adil melalui penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. WTO juga menangani isu-isu baru seperti perlindungan lingkungan dan hak kekayaan intelektual, memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak merusak ekosistem. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa, WTO memberikan platform bagi negara anggota untuk menentang kebijakan perdagangan yang dianggap diskriminatif (Suhardi, 2007). Peran World Trade Organization (WTO) dalam mengurangi dampak negatif perdagangan internasional adalah dengan

mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ke dalam perdagangan internasional. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan makhluk hidup agar dapat berjalan seimbang. Upaya perlindungan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dan dijadikan prasyarat penting dalam perdagangan internasional serta proses globalisasi ekonomi. Perlindungan ini mencakup berbagai langkah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pembatasan penjualan hasil alam, dan pengendalian eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Fauzi, 2023).

WTO menghadapi beberapa tantangan dalam mengawasi liberalisasi perdagangan, antara lain:

a. Perbedaan Kekuatan Ekonomi

Negara maju sering kali mendominasi negosiasi dan keputusan, yang dapat merugikan negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas.

b. Kepatuhan Anggota

Memastikan semua anggota berpartisipasi secara aktif dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati menjadi sulit, terutama ketika kepentingan nasional bertentangan

c. Isu Baru

Memasukkan isu-isu baru seperti perubahan iklim dan hak kekayaan intelektual ke dalam kerangka perjanjian perdagangan menambah kompleksitas dan tantangan bagi WTO

d. Diskriminasi

Praktik diskriminatif terhadap negara non-anggota dalam perdagangan dapat menghambat integrasi yang adil dalam sistem perdagangan global.

WTO mengatasi keberagaman kebijakan perdagangan di antara negara anggotanya melalui beberapa prinsip dan mekanisme:

a. Prinsip Most Favoured Nation (MFN)

Memastikan bahwa semua anggota mendapatkan perlakuan yang sama dalam perdagangan, tanpa diskriminasi terhadap negara tertentu.

b. National Treatment

Mengharuskan negara anggota untuk memperlakukan barang dan jasa asing dengan cara yang sama seperti barang dan jasa domestik, mencegah diskriminasi.

c. Special and Differential Treatment (SDT)

Memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang untuk membantu mereka beradaptasi dan bersaing di pasar global, termasuk dalam penyelesaian sengketa.

d. Sistem Penyelesaian Sengketa

Menyediakan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik perdagangan.

Kesimpulan

Liberalisasi perdagangan merupakan elemen penting dalam perkembangan ekonomi global yang bertujuan meningkatkan aliran barang, jasa dan investasi dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Konsep ini memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan efisiensi industri, memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Namun, dampaknya tidak selalu merata, karena dapat menimbulkan tantangan serius seperti tekanan terhadap industri lokal, ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Keberhasilan implementasi liberalisasi perdagangan sangat bergantung pada kesiapan kebijakan domestik dan struktur ekonomi masing-masing negara. Negara berkembang perlu mengadopsi langkah-langkah perlindungan terhadap sektor rentan, seperti subsidi, pelatihan tenaga kerja, dan kebijakan perdagangan yang strategis, untuk memaksimalkan manfaat dari keterbukaan pasar.

Di sisi lain, peran organisasi internasional seperti WTO menjadi sangat penting dalam memastikan perdagangan global berlangsung secara adil, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengelola kepatuhan dan kesetaraan antar negara. Dalam jangka panjang, liberalisasi perdagangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Namun, untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, setiap negara perlu menyiapkan kebijakan yang matang, meningkatkan daya saing, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiyah, S., Hutabarat, A. R., & Sianipar, D. V. B. (2005). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perilaku Pembentukan Harga Produk Industri melalui Structure-Conduct Performance Model. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 7(4), 523–554. <https://doi.org/10.21098/bemp.v7i4.123>
- Bacchetta, M., & Jansen, M. (2003). *Adjusting to trade liberalization: The role of policy, institutions and WTO Disciplines*. WTO.
- Budiyanti, E. (2017). *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 22(1).
- Fahrazi, M. (t.t.). *Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan*. 2.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Aida, N., Riyanto, F. D., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung. (2021). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Indonesia: Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan pada Mitra Dagang Utama. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(3), 243–253. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.107>

- Fauzi, A. F. (2023). Peran Word Trade Organization (WTO) dalam Perlindungan Lingkungan di Era Liberalisasi Perdagangan. *CREPIDO*, 5(1), 93–103. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hardono, G. S., Saliem, H. P., & Suhartini, T. H. (2016). Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 75. <https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.75-88>
- Islamiani, Y. (2022). *Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekspor dan impor di Indonesia*.
- Kholiq, A. A., Indriastuti, S., & Fathoni, J. (2024). Liberalisasi Perdagangan Internasional dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Latifah, E. (t.t.). *Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia*.
- Manuputy, A. (2019). *Kajian Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan Dibidang Jasa Oleh Negara-negara ASEAN Melalui AFAS*. 3.
- Mastering the transition: A synthetic literature review of trade adaptation policies* (OECD Economics Department Working Papers No. 1719; OECD Economics Department Working Papers, Vol. 1719). (2022). <https://doi.org/10.1787/5fad3487-en>
- Musjtari, D. N. (2014). *Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam WTO Agreement terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. 63.
- Nurrahma, & Nurrahma, T. (2013). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Efisiensi Teknis Perusahaan pada Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 82–108. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.05>
- Permata Sari, C. D., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464–2473. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Purwiyanta, J. (2006). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Tingkat Employment dan Upah pada Industri Manufaktur Padat Karya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vo. 7.
- Roza Nova, S. A. (2024). Implikasi Agreement on Agriculture (Aoa/Wto) Terhadap Pengaturan Perdagangan Produk Pertanian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 396–407. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1963>
- Rusandi & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Seran, M. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. *MMH*, Vol 43, No 3. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.389-395>
- Suhardi, G. (2007). Peran WTO dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 No. 1.
- Susila, W. R. (t.t.). *Esensi dan Dampak Liberalisasi Perdagangan pada Subsektor Perkebunan*.
- Tanaem, E. R., & Arisanto, P. T. (2009). *Konflik Kepentingan dalam Liberalisasi Perdagangan Garam Tahun 2009—2014*.